



ENRICHMENT MATERI PEMBELAJARAN SEJARAH TENTANG KUMPENI DI BANGER ABAD XVIII

Paundra Wangsa Fajar Kusuma^{1(*)}, Daya Negri Wijaya²

Universitas Negeri Malang, Indonesia¹²

paundra.wangsa.2107316@students.um.ac.id¹, daya.negri@fis.um.ac.id²

Abstract

Received: 30 Januari 2024
Revised: 20 Agustus 2024
Accepted: 20 September 2024

Artikel ini ditulis untuk pengembangan materi pembelajaran sejarah tentang Kumpeni di Banger Abad XVIII. Metode sejarah digunakan sebagai acuan dalam menyelesaikan artikel ini melalui tahap pemilihan topik, heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Artikel ini menghimpun hasil penelitian terdahulu yang telah merekonstruksi pengaruh Kumpeni di Banger Abad XVII pada aspek politik, ekonomi, dan sosial. Historiografi tersebut berguna sebagai *Enrichment* dalam pembelajaran sejarah pada materi Penjajahan Bangsa Barat Indonesia pada jenjang SMA/Sederajat sesuai dengan struktur Kurikulum Merdeka. Penulisan artikel ini berupaya untuk mengkaji, menelaah, dan menarasikan dampak kolonialisme Kumpeni di Banger Abad XVIII dalam aspek politik, ekonomi, dan sosial untuk selanjutnya dapat dijadikan suplemen berikut dengan contoh implementasinya pada jenjang SMA/ sederajat. Kajian ini dapat membangun rekonstruksi sejarah secara menyeluruh sehingga dapat menghasilkan ilmu pengetahuan, persepsi, dan historiografi kolonialisme di Nusantara berdasar perspektif lokal guna kebutuhan pendidikan sejarah era Kurikulum Merdeka.

Keywords: *Enrichment*; Materi Pembelajaran Sejarah; Kumpeni; Banger; Kurikulum Merdeka

(*) Corresponding Author: Kusuma, paundra.wangsa.2107316@students.um.ac.id

How to Cite: Kusuma, P. W. F. & Wijaya, D. N. (2024). *ENRICHMENT MATERI PEMBELAJARAN SEJARAH TENTANG KUMPENI DI BANGER ABAD XVIII. Research and Development Journal of Education*, 10(2), 1105-1119

INTRODUCTION

Perubahan kurikulum dalam sistem pendidikan merupakan sebuah keniscayaan. Kurikulum bukan benda mati yang tidak pernah tersentuh ide perubahan mengikuti perkembangan zaman yang dinamis (Santika et al., 2022). Termasuk pada abad 21, Kurikulum Merdeka hadir untuk mempersiapkan generasi penerus Indonesia yang cakap dan adaptif terhadap tuntutan yang kompleks di masa mendatang (Kurniati et al., 2022). Implikasi tuntutan tersebut mempengaruhi kegiatan pembelajaran dalam berbagai mata pelajaran, tidak terkecuali sejarah. Pembelajaran sejarah telah menjadi muatan integral dari kurikulum pendidikan di Indonesia sejak lama. Bukan tanpa alasan, pembelajaran sejarah memiliki tujuan utama untuk membentuk pribadi yang arif bijaksana serta pemahaman yang mendalam terhadap peristiwa-peristiwa masa lalu yang telah membentuk identitas bangsa (Kuntowijoyo, 2018).

Pada era Kurikulum Merdeka, keragaman dan kompleksitas topik pembelajaran sejarah harus tersaji dengan cara yang relevan dan menarik agar dapat memotivasi peserta didik untuk menggali materi sejarah lebih dalam (Rimatuzzahriah et al., 2023). Hal tersebut sesuai dengan karakteristik utama tujuan pembelajaran sejarah yang terletak pada keragaman dan kompleksitas topik sejarah guna meningkatkan nasionalisme dan mencetak

pribadi yang arif bijaksana (Kuntowijoyo, 2018). Perlu suatu pendekatan penyajian materi yang tidak hanya menarik tetapi juga relevan sehingga mampu memberikan motivasi bagi siswa untuk meresapi dan mengeksplorasi sejarah dengan lebih mendalam. Dengan kata lain, perlu meningkatkan ketertarikan peserta didik terhadap materi sejarah sangat penting agar dapat merekonstruksi pemahaman yang kokoh terhadap peristiwa sejarah.

Sejarah dapat dikatakan sebagai mata pelajaran yang memberikan pemahaman yang sebenarnya terhadap kondisi masa sekarang sebagai hasil mempelajari masa lalu sehingga menjadikan manusia menjadi lebih baik dalam memilih keputusan-keputusan hidup (Pramartha & Parwati, 2020). Saat ini, kedudukan sejarah dalam Kurikulum Merdeka terus mengalami transformasi, baik dari segi materi maupun tuntutan penguasaan keterampilan bagi peserta didik. Struktur pembelajaran sejarah tidak lagi menekankan pemahaman konsep melainkan lebih pada keterampilan proses. Secara lebih spesifik, pembelajaran sejarah secara khusus memiliki keterampilan berbasis proses yaitu keterampilan berpikir sejarah (Ofianto, 2017). Berkaitan dengan itu, sejarah lokal dapat menjadi alternatif stimulus dan materi guna melatih dan mengoptimalkan keterampilan berpikir sejarah berbasis proses (Hidayanti & Hidayat, 2020).

Secara konseptual, sejarah lokal merupakan studi mengenai kehidupan masyarakat atau khususnya komunitas dari suatu lingkungan sekitar (neighborhood) tertentu dalam perkembangan berbagai aspek kehidupan manusia (Widja, 1991). Sesuai dengan struktur kurikulum Merdeka, sejarah berbasis sejarah lokal membawa terobosan baru dalam pembelajaran sejarah utamanya berkaitan dengan perlunya muatan sejarah berbasis sejarah lokal yang terintegrasi dengan kegiatan belajar mengajar (Prasetya et al., 2020). Dengan kata lain, dinamika penyempurnaan kurikulum di segala jenjang semakin memperkuat posisi sejarah lokal sebagai muatan penting dalam merenungi peristiwa masa lalu yang terjadi di lingkungan sekitar (Kuswono et al., 2021). Oleh karena itu, butuh eksplorasi berbagai peristiwa sejarah lokal yang potensial sebagai pengembangan materi pembelajaran sejarah berbasis sejarah lokal pada era Kurikulum Merdeka.

Terdapat berbagai peristiwa sejarah lokal yang potensial dan relevan menjadi materi ajar era kurikulum Merdeka. Salah satunya adalah rekonstruksi sejarah *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) atau biasa dikenal dengan Kumpeni di Banger pada abad ke XVIII. Penyebutan *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) menjadi Kumpeni terjadi semenjak kesalahan pribumi dalam melafalkan nama kongsi dagang Belanda *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) (Tifada & Noviana, 2020). Penduduk pribumi hanya mengingat kata paling akhir, yakni *Compagnie*. Lambat laun lidah Nusantara mulai menyerap kata tersebut menjadi 'Kumpeni'. Sementara itu, Banger merupakan wilayah yang terletak pada *Oosthoek* Jawa atau Ujung Timur Jawa yang berada di wilayah Tapal Kuda tepatnya masuk dalam administrasi wilayah Kota dan Kabupaten Probolinggo sekarang.

Materi tersebut relevan dengan Capaian Pembelajaran Sejarah pada Fase F sesuai dengan Kurikulum Merdeka khususnya pada materi Penjajahan Bangsa Barat. Mengingat historiografi tentang Kumpeni masih didominasi oleh perspektif sejarah nasional, perlu pengayaan materi Kumpeni berbasis sejarah lokal khususnya di Banger. Kumpeni mulai intensif menguasai wilayah Banger semenjak adanya perjanjian antara Sunan Pakubuwana II dengan Kumpeni pada 11 November 1743 (Buddingh, 1859). Pada awalnya, kehadiran Kumpeni yang notabene perusahaan dagang milik Belanda hanya bertujuan untuk memperluas jaringan perdagangan (Nugroho, 2023). Namun demikian, dalam perjalanannya memiliki dampak besar terhadap perkembangan politik, ekonomi, dan sosial di berbagai wilayah kekuasaannya.

Dengan menganalisis kekuasaan Kumpeni di Banger pada abad XVIII akan memberikan pemahaman secara kompleks dan menyeluruh bagi peserta didik mengenai

perubahan politik, ekonomi, dan sosial serta kompleksitas dinamika kekuasaan Kumpeni yang terjadi di wilayah Banger. Selain itu, materi pengayaan dilengkapi dengan narasi dinamika politik antara Kumpeni dan penguasa lokal. Mengingat keberhasilan Kumpeni tidak hanya tergantung pada kekuasaan dan kontrol ekonomi, tetapi juga pada dukungan dan kerja sama dengan elite lokal dan struktur pemerintahan setempat (Basri et al., 2024). Elite lokal yang dimaksud adalah kalangan bangsawan berperan penting dalam memperluas wilayah kekuasaan Kumpeni melalui perjanjian dan diplomasi.

Berdasarkan uraian tersebut, tulisan ini akan fokus membahas bagaimana posisi Banger dalam geopolitik Jawa abad XVIII. Tidak hanya itu, tulisan ini juga membahas pemerintahan Kumpeni di Banger ditinjau dari aspek politik, ekonomi, dan sosial. Akhir tulisan ini akan membahas bagaimana implementasi *Enrichment* materi ajar Kumpeni di Banger abad XVIII sesuai dengan struktur Kurikulum Merdeka. Dengan demikian, pembelajaran sejarah tidak hanya menjadi suatu kewajiban akademis, tetapi juga menjadi sarana efektif untuk membentuk generasi yang memiliki pemahaman mendalam terhadap perjalanan sejarah bangsanya.

METHODS

Penulisan artikel ini menggunakan metode sejarah. Metode penelitian sejarah menurut Kuntowijoyo terdiri dari lima langkah yaitu pemilihan topik, heuristik (pengumpulan sumber), verifikasi (kritik sumber), interpretasi, dan historiografi (Kuntowijoyo, 2018). Pemilihan topik dilakukan dengan menganalisis potensi masalah dan keterbaruan riset yang relevan. Proses pengumpulan sumber dilakukan dengan menelusuri sumber Belanda berupa arsip Belanda dan sumber lokal (babad) seperti Babad Blambangan yang berkaitan dengan kolonialisme Kumpeni di Banger Abad XVIII. Sumber-sumber yang telah terhimpun kemudian diidentifikasi melalui tahap kritik untuk membuktikan keabsahan sumber sejarah beserta isi atau konteks yang terkandung. Setelah dirasa absah, masing-masing sumber sejarah diinterpretasikan sesuai dengan konteks apa adanya. Seluruh hasil interpretasi kemudian dihimpun menjadi suatu historiografi yang utuh dan runtut. Historiografi yang telah disusun kemudian diramu menjadi sebuah materi pengayaan yang sesuai dengan karakteristik peserta didik pada jenjang menengah atas sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku di Indonesia saat ini yaitu kurikulum Merdeka.

RESULTS & DISCUSSION

Results

1. Banger dalam Arus Geopolitik Jawa Abad XVIII

Bagi kalangan sejarawan, Pantura Jawa menjadi wilayah yang penting yang dikenal sebagai *the Java Sea zone* maupun *the Java Sea Networks* atau jaringan Laut Jawa (Utami et al., 2023). Kawasan Pantura Jawa menjadi kawasan penting karena beberapa faktor. Pertama, kondisi Pantura Jawa cenderung aman digunakan sebagai tempat singgah para pedagang yang tengah melakukan pelayaran jarak jauh sehingga berperan dalam memicu berkembangnya berbagai pelabuhan (Sulistiyono, 2017). Kedua, berbagai macam logistik untuk perjalanan jarak jauh mudah didapat di kawasan Pantura dengan didukung *hinterland* yang subur dan melimpah (Hartatik, 2018). Ketiga, pola pelayaran masih memanfaatkan bantuan angin sehingga Pantura Jawa menjadi

lokasi yang 'mau-tidak mau' harus disinggahi oleh para pedagang (Sulistiyono, 2017). Keempat, Pantura Jawa memiliki *hinterland* yang kaya dengan komoditi penting yang menjadi banyak dicari orang (Astutik & Alrianingrum, 2013). Kelima, Pantura Jawa merupakan kawasan perdagangan yang sangat menguntungkan bagi para pedagang untuk menjual komoditi impor ke Jawa karena jumlah penduduk yang cukup ramai dengan kawasan lain di Nusantara (Wasino & Hartatik, 2019).

Keunggulan-keunggulan tersebut berhasil memikat Kumpehi pada abad XVII hingga abad XVIII untuk memperluas jaringan perdagangan rempah menuju di berbagai wilayah Nusantara (Pramasto & Meyrinaldy, 2020). Ekspansi tersebut menasar berbagai wilayah termasuk Banger, sebuah wilayah yang kaya subur di *Oosthoek* Jawa (Ujung Timur Jawa) yang saat ini dikenal dengan sebutan Probolinggo. Banger menjadi salah satu wilayah monopoli perdagangan yang tidak dapat dipisahkan dari strategi ekspansi dan perluasan hegemoni Kumpehi. Untuk dapat menguasai Banger, Kumpehi melakukan berbagai upaya termasuk dengan menggalang dukungan dan kerja sama dengan bangsawan dan struktur pemerintahan pribumi. Salah satu bentuk konkret aliansi Kumpehi dengan kaum bangsawan adalah saat bersekutu dengan Sunan Pakubuwana II pada peristiwa Geger Pecinan (Daradjadi, 2017) yang berakhir pada penyerahan wilayah *Oosthoek* Jawa kepada Kumpehi.

Geger Pecinan merupakan peristiwa yang terjadi karena kebangkrutan pabrik gula milik orang Tionghoa (Mahdun, 2017). Disisi lain, imigran Tionghoa di Batavia terus mengalami peningkatan sehingga pihak Kumpehi menerbitkan resolusi tanggal 25 Juli 1740 yang berisi instruksi besar-besaran untuk memeriksa izin tinggal orang Tionghoa, jika kedatangan tidak memiliki izin tinggal atau bahkan pengangguran, maka akan dipaksa kembali ke Tiongkok atau dibawa ke Ceylon (Sri Lanka) dan Tanjung Harapan sebagai kuli perkebunan dan pertambangan (Rommelink, 2022). Isu-isu tersebut menimbulkan pemberontakan komunitas Tionghoa pada tanggal 7 Oktober 1740 dibawah komando Wang Tai Pan atau Khe Pandjang (Salsabilla & Ramadinata, 2021). Pemberontakan berlanjut pada 9 Oktober 1740 dengan pembakaran warung-warung milik Tionghoa bersamaan dengan penjarahan secara brutal. Pemberontakan tersebut menuai reaksi keras VOC hingga membalas dengan membantai komunitas Tionghoa di Batavia. Pemberontakan ini menjadi tragedi yang menewaskan kurang lebih 10.000 Tionghoa (Salsabilla & Ramadinata, 2021). Peristiwa pembantaian itu dikenal dengan "Geger Pecinan" atau "Tragedi Berdarah Angke" karena Kali Angke sebagai tempat pembantaian berubah warna menjadi merah penuh dengan darah (Husin, 2016). Peristiwa pembantaian itu dikenal dengan "Geger Pecinan" atau "Tragedi Berdarah Angke" karena Kali Angke sebagai tempat pembantaian berubah warna menjadi merah penuh dengan darah (Husin, 2016).

Rangkaian pemberontakan dan pembantaian tersebut menimbulkan dampak baik bagi Kumpehi maupun pihak Tionghoa. Pihak Kumpehi menghadapi krisis ekonomi yang cukup parah sedangkan orang Tionghoa yang masih hidup terpaksa berpindah ke beberapa wilayah di Jawa bagian Tengah dan sebagian lainnya dipulangkan ke Tiongkok (Salsabilla & Ramadinata, 2021). Namun kenyataannya, pengungsi Tionghoa dibiarkan turun di Semarang dan pada akhirnya menetap dan terus berkembang menjadi sebuah pemukiman. Secara spesifik, lebih kurang 1.000 orang Tionghoa yang berasal dari Batavia mengungsi ke beberapa kota di pesisir Jawa bagian utara seperti, Semarang, Juwana (Pati), dan Lasem (Aziz, 2020).

Seusai pemberontakan di Batavia, komunitas Tionghoa melakukan serangan balasan terhadap Kumpehi yang disebut perang Sepanjang pada 1740-1743 (Perang Kuning) (Aziz & Wildan, 2022). Komunitas Tionghoa juga melakukan pemberontakan terhadap Kumpehi dengan menyerang Kartasura yang notabene masuk dalam wilayah

Kerajaan Mataram Islam yang dikuasai oleh Sunan Pakubuwana II kala itu. Pada awal tahun 1741 Sunan Pakubuwana II berpihak kepada pemberontakan komunitas Tionghoa. Namun, keadaan berbalik dengan Sunan Pakubuwana II mendukung Kumpeni pada awal 1742 (Rahayu & Wirajaya, 2020). Hal menarik dalam pemberontakan tersebut terjadi ketika kekuatan komunitas Tionghoa bersatu dengan Laskar Jawa pribumi karena memiliki kesamaan tujuan yaitu memberontak dengan Kumpeni yang beraliansi dengan Sunan Pakubuwana II.

Meski sempat direbut oleh aliansi pemberontak, pada akhir tahun 1742 Sunan Pakubuwana II berhasil merebut keraton kembali tanpa menghentikan perang gerilya. Perjuangan Raden Mas Garendi saat pemberontakan merebut keraton tak dapat dipisahkan dengan peran Kapiten Sepanjang yang berasal dari pihak Tionghoa. Tak berselang lama, tepat pada 2 Desember 1743 Sunan Kuning atau Raden Mas Garendi berhasil ditangkap dan diasingkan ke Sri Lanka (Salsabilla & Ramadinata, 2021). Sementara itu, Kapiten Sepanjang tetap melanjutkan perjuangannya (Daradjadi, 2017).

Dengan membantu Sunan Pakubuwana II untuk meredam pemberontakan Kumpeni mendapat wilayah yang sangat potensial dan strategis dalam perniagaan. Wilayah yang dimaksud adalah *Oosthook* Jawa yang notabene merupakan wilayah Ujung Timur Jawa. Madura, Banger, Surabaya, Rembang, dan Jepara diserahkan kepada Kumpeni sesuai dengan perjanjian antara Sunan Pakubuwana II dengan Kumpeni tertanggal 11 November 1743 (Buddingh, 1859). Salah satu wilayah tersebut adalah Banger yang memiliki kondisi alam yang subur dengan letak geografis yang strategis. Tak heran, ketika telah mendapat kekuasaan di *Oosthook* Jawa, Kumpeni menerapkan berbagai kebijakan dalam aspek politik, ekonomi, dan sosial untuk mengeksploitasi potensi daerah jajahan secara maksimal.

2. Bayang-Bayang Kumpeni di Banger Abad XVIII

Sebelum 1800, Banger adalah nama yang digunakan untuk menyebut Probolinggo sekarang (Winarni, 2018). Saat itu, Banger terdiri dari berbagai distrik yang meliputi Paiton, Kraksaan, Jabong, Pajarakan, Dringu, Probolinggo, Sumberkareng, dan Tongas atau Wonosari (Tengger) (Margana, 2007). Selain Pasuruan, Banger merupakan satu-satunya wilayah di *Oosthook* Jawa yang langsung dihuni oleh Kumpeni setelah penandatanganan perjanjian tahun 1743 antara Sunan Pakubuwana II dengan Kumpeni di Batavia (Margana, 2007). Ketika telah diserahkan oleh Sunan Pakubuwana II kepada Kumpeni, *Oosthook* Jawa telah dianggap sebagai investasi bagi masa depan Kumpeni.

Pada tahun 1743 Sunan Pakubuwana II dari Mataram menyerahkan wilayah *Oosthook* Jawa kepada Kumpeni sebagai balasan atas keberhasilan dalam mengembalikan tahta Sunan Pakubuwana II dari pemberontak (Rommelink, 2022). Kumpeni mendapatkan hak atas wilayah *Oosthook* Jawa berdasar pada perjanjian dengan Sunan Pakubuwana II pada 11 November 1743 (Buddingh, 1859). Isi perjanjian tersebut menyatakan bahwa seluruh ujung timur Jawa menjadi daerah kekuasaan Kumpeni. Implikasi perjanjian 11 November 1743, Banger praktis berada di bawah kekuasaan Kumpeni (Lekkerkerker, 1931).

Penyerahan kekuasaan untuk wilayah *Oosthook* Jawa ditandai dengan Kumpeni berhak mengangkat bupati di wilayah itu. Khusus wilayah Banger, Kumpeni mengangkat Jayalalana III yang dijuluki Jayalalana Brayung menjadi Bupati Banger (1746-1764) (Arifin, 1995). Dengan demikian, corak kekuasaan Kumpeni di Banger masih mempertahankan penguasa lokal sebagai perpanjangan tangan. Namun demikian, pemimpin daerah yang dipilih harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan seperti menyanggupi setoran tahunan dan tidak merugikan kekuasaan Kumpeni. Dengan kata

lain, Banger yang termasuk dalam daerah yurisdiksi Kumpeni harus mematuhi segala aturan termasuk pemimpin daerah menjadi 'bupati Kumpeni' (Sapto, 2012). Pengangkatan bupati oleh Kumpeni berimplikasi pada penyerahan upeti penduduk Banger yang sebelumnya ditujukan kepada Sultan Mataram menjadi beralih kepada Kumpeni. Tentu kebijakan semacam itu bertujuan untuk menjaga kepentingan perdagangan dan kebutuhan rumah tangga Kumpeni.

Secara lebih spesifik, Kumpeni mewajibkan upeti kepada rakyat Banger sesuai dengan ketentuan. Penyerahan upeti wajib kepada Kumpeni menyesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan baik dari segi waktu penyerahan, jumlah upeti, dan jenis upeti (Kartodirdjo, 1988). Tentu kebijakan menunaikan upeti bertujuan untuk menjaga kas Kumpeni (Shabri et al., 2023). Pemberlakuan pungutan hasil bumi terhadap penduduk pribumi telah berjalan sejak Kumpeni menerapkan sistem pemerintahan tidak langsung guna memperoleh komoditas dagang (Wijayati, 2010). Langkah yang ditempuh Kumpeni pada dasarnya merupakan bentuk lain dari penarikan pajak yang diterapkan di daerah-daerah kekuasaan Kumpeni termasuk Banger yang merupakan bagian dari *Oosthook* Jawa.

Berdasarkan uraian tersebut, sebagai daerah jajahan Banger wajib membayar upeti dan kewajiban lainnya. Namun karena kemiskinannya, untuk sementara waktu Banger terbebas dari kewajiban menanggung biaya perjalanan dinas, tetapi tetap diharuskan menyerahkan hasil pajak pelabuhan, cukai impor, dan mengirimkan tenaga kerja (Sapto, 2012). Besaran jumlah penyerahan pajak dan upeti menandakan rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk di Banger masa itu. Secara perbandingan, Bupati Bangil Ngabehi Prodjo Judho dapat menyerahkan upeti 3 koyang beras dengan jumlah setiap koyang setara dengan 30 pikul. Sedangkan Bupati Banger Ngabehi Jayalelana hanya dapat membayar upeti sebanyak 3 pikul beras dengan jumlah setiap pikul sebesar 61,76 kilogram (Wijayati, 2010).

Meski sempat berada dalam bayang-bayang kemiskinan, Banger terus berupaya untuk meningkatkan kondisi perekonomian. Pada abad XVIII Banger menduduki posisi yang sangat signifikan dalam kerangka ekonomi Kumpeni yang berbasis perdagangan. Hal tersebut selaras dengan pernyataan bahwa beras dari Jawa menjadi komoditi ekspor unggulan di kawasan perdagangan Selat Melaka (Sulistiyono, 2017). Progres perekonomian Banger semakin membaik sehingga Kumpeni menetapkan kebijakan peningkatan beban upeti. Memori Nicolaous Hartings tertanggal 26 Oktober 1761 menyatakan bahwa Banger adalah sebuah wilayah kecil, namun memiliki letak yang strategis sehingga mampu membayar cukai 300 Ringgit Spanyol dengan setiap 1 Ringgit Spanyol sama dengan 2,2 Java Rupees setiap tahun serta upeti sebesar 8 koyang beras, 6 pikul lilin pada Kumpeni (Wijayati, 2010).

Beranjak pada awal tahun 1767, Kumpeni di Batavia mengubah kebijakan terhadap *Oosthook* Jawa sekaligus menyiapkan ekspedisi militer sebagai respon terhadap laporan mengenai perkembangan politik yang mengkhawatirkan di *Oosthook* setelah pendudukan Bali pada tahun 1764 (Margana, 2007). Kumpeni mengungkapkan rencana untuk menyerang aliansi ekonomi dan politik antara penguasa Bali - baik di Bali maupun di Blambangan - dengan para pedagang Inggris. Bukan tanpa alasan, kehadiran Inggris mengancam kekuasaan Kumpeni di Jawa khususnya di *Oosthook* Jawa. Keputusan untuk melakukan ekspedisi militer ke *Oosthook* Jawa diambil oleh Pemerintah Tinggi Kumpeni pada bulan Juli 1766. Tujuan dari ekspedisi tidak hanya menghalangi upaya perdagangan Inggris di *Oosthook* Jawa, tetapi juga mengeliminasi pemberontak yang melarikan diri (Margana, 2007).

Menindaklanjuti kebijakan tersebut, pada tanggal 20 Desember 1767 Gubernur VOC memerintahkan Pemerintah Tinggi Kumpeni di Batavia untuk mengirimkan lebih

banyak personel militer dan kapal ke *Oosthook* Jawa serta meyakinkan Panembahan Madura untuk mengirim pasukannya ke Blambangan (Margana, 2007). Kapal dan pasukan dari Batavia ditugaskan untuk menjaga Selat Bali agar mencegah orang-orang Melayu atau Bali menyelundupkan senjata yang bisa jadi berasal dari Inggris untuk membantu Pangeran Wilis dalam melawan Kumpeni.

Sementara itu pada tahun yang sama, Bupati Banger Jayalelana dipecat dari jabatannya oleh Kumpeni atas alasan yang masih samar (Margana, 2007). Sebagai pengganti Bupati Jayalelana, Tumenggung Jayanegara dari Surabaya diangkat menjadi Bupati Banger oleh Kumpeni (1767-1804) (Arifin, 1995). Bupati Jayanegara dikenal luas oleh masyarakat dengan sebutan Kyai Jimat (seorang pria yang bisa dipercayai) yang membawa perdamaian dan kemakmuran bagi masyarakat Banger. Selama masa kepemimpinan Tumenggung Jayanegara, ekonomi Banger terus mengalami peningkatan yang signifikan (Jonge, 1862). Peningkatan kondisi perekonomian tersebut terekam dalam beberapa bukti sejarah.

Sebelum pemerintahan Bupati Jayanegara, Gubernur Nicolaous Hartingh menulis bahwa Banger adalah kabupaten kecil yang hanya memberikan 8 koyang beras, 6 pikul lilin, dan 300 Rds pajak laut per tahun kepada Kumpeni (Margana, 2007). Selaras dengan itu, pada tahun 1771, Gubernur Johannes Vos juga melaporkan bahwa selama perang Banger hanya memasok upeti kecil untuk Kumpeni. Menurut catatan John Vos tanggal 24 Juli 1771, Banger adalah kabupaten otonom yang memiliki kewajiban untuk membayar cukai 375 Rds setiap tahun serta menyetorkan 8 koyang beras, 8 pikul lilin, dan 2 pikul benang kapas. Selain pacht sebesar 375 Rds per tahun, Banger menyetorkan 2 pikul gaaren untuk membuat tali kapal, 8 koyang beras, dan 6 pikul lilin. Sementara itu, J. R. van den Burgh menjelaskan bahwa selama rentang 1767-1784, Banger bersama dengan Bangil, Pasuruan, dan Blambangan dibebaskan dari kewajiban *leverantie* (Jonge, 1862).

Memasuki tahun 1784 kondisi perekonomian Banger menjadi lebih baik. Dengan kondisi yang semakin membaik, Banger wajib menyetorkan upeti 40 koyang beras, nila, sarang burung, dan membayar uang sebesar 450 ringgit (Lekkerkerker, 1931). Pada saat Banger menunjukkan hasil bumi yang lebih baik, Van Isseldijk selaku Komisaris Wilayah Ujung Timur (1798-1799) menerapkan kebijakan menaikkan contingent yang harus dibayarkan (Lekkerkerker, 1931). Sementara itu, upeti tahunan yang sebesar 40 koyang beras, 450 Ringgit cukai, dan sewa sarang burung diborongkan seharga 140 dollar Spanyol setiap tahun (Wijayati, 2010).

Sekitar tahun 1790-an, Banger telah memproduksi nila dan memberikan pacht sebesar 450 Rds per tahun beserta 140 Rds sarang burung walet dari Lumajang setiap tahun (Margana, 2007). Berkat kepemimpinan Jayanegara, ladang-ladang padi baru baik sawah (ladang basah) maupun tegalan (ladang kering) dibuka untuk meningkatkan produksi beras. Tidak hanya itu, Bupati Jayanegara juga memperluas jumlah saluran irigasi guna meningkatkan hasil pertanian. Kemajuan ekonomi yang cukup signifikan tersebut berdampak pada peningkatan jumlah upeti yang harus disetorkan kepada Kumpeni yakni menjadi 40 koyang beras (Jonge, 1862). Dengan begitu, masyarakat Banger merasa sangat terbebani oleh kebijakan tersebut.

Tidak hanya upeti wajib, pendapatan Kumpeni dari daerah jajahan bersumber dari pajak pegadaian, perjudian, pajak sarang burung, cukai pasar, pajak sabung ayam, dan sewa tanah (Wijayati, 2010). Dengan banyaknya jenis upeti dan pajak yang dibebankan pada rakyat, Kumpeni butuh mengakomodasi peran dan tanggung jawab sebagai pengumpul pajak di seluruh wilayah jajahan, termasuk di *Oosthook* Jawa atau Ujung Timur Jawa. Oleh karena itu, Kumpeni merekrut pengumpul pajak dan upeti dilakukan oleh seorang pegawai penarik pajak yang disebut dengan *bekel* dan *demang*.

Dilain sisi, perluasan pengaruh Kumpeni di *Oosthook* Jawa secara perlahan namun pasti membatasi jaringan perdagangan otonom yang telah ada hingga mengubah orientasi dan hasil (Margana, 2007). Menyikapi kedatangan Kumpeni, komunitas pedagang lokal yang notabene memiliki pengaruh signifikan dalam perkembangan ekonomi di *Oosthook* Jawa menunjukkan sikap yang berbeda. Para politik kapitalis atau aristokrat pedagang lebih memilih bekerjasama dengan Belanda (Wertheim, 1956). Sementara itu, sebagian lainnya enggan dihegemoni dan lebih memilih untuk menciptakan jaringan alternatif. Komunitas pedagang tersebut memposisikan diri sebagai pedagang bebas, berdiri melawan pihak dominan. Dengan kata lain, para diaspora pedagang bebas menganggap monopoli Kumpeni sebagai ancaman terhadap jaringan perdagangan lokal yang telah mapan (Margana, 2007).

Pedagang memiliki peran signifikan dalam melawan dominasi politik Kumpeni di *Oosthook* Jawa. Pedagang yang tidak bekerja sama dengan Kumpeni menjadi terusir bahkan membangun pemukiman baru sebagai pusat perdagangan. Para pedagang yang membangun pemukiman perdagangan baru bermaksud untuk mengembangkan jaringan alternatif yang otonom di *Oosthook* Jawa (Margana, 2007). Langkah tersebut merupakan tindakan perlawanan terang-terangan terhadap hegemoni Kumpeni. Perlawanan terhadap kumpeni diekspresikan dalam berbagai bentuk. Perlawanan paling ekstrem diwujudkan dalam penyelundupan dan perompakan yang sedikit banyak mengancam kekuasaan Kumpeni (Warren, 1998).

Selain aspek ekonomi, Kumpeni juga mendirikan Benteng sebagai tempat pertahanan dan brankas untuk mengamankan aset-aset (Shabri et al., 2023). Dengan kata lain, benteng yang dibangun Kumpeni berfungsi sebagai area pertahanan dalam menghadapi serangan musuh. Pembangunan Benteng tersebut merupakan bagian dari strategi menyerang penduduk sehingga menerapkan konsep pengawasan panoptisisme terhadap daerah sekitarnya utamanya pelabuhan (Shabri et al., 2023). Selain itu, benteng yang dibangun Kumpeni juga dimanfaatkan sebagai sarana pendukung monopoli perdagangan bersama dengan Bupati Banger yang terjadi sekitar 1743-1800. Tak lupa Kumpeni juga merekrut tenaga kerja untuk memindahkan barang serta logistik, memelihara jalan, dan merawat bangunan-bangunan di benteng (Sapto, 2012).

Berdasarkan uraian sebelumnya, kunci keberhasilan VOC dalam mempertahankan hegemoni di Jawa ditentukan oleh kepiawaian dalam membangun hubungan baik dengan penguasa lokal, terutama setelah Perang Suksesi Jawa yang berakhir pada 1757 (Margana, 2007). *Oosthook* Jawa tidak dapat sepenuhnya diintegrasikan ke dalam hegemoni Kumpeni di Kepulauan Indonesia tanpa dukungan sekutu lokal. Hal tersebut terjadi karena Kumpeni dan para penguasa setempat memiliki kepentingan dan agenda tersendiri tetapi bersatu dalam tujuan bersama untuk menjaga stabilitas kekuatan di Jawa. Kumpeni yang notabene perusahaan dagang milik Belanda secara resmi dibubarkan pada 31 Desember 1799 (Hasibuan, et al., 2024; Nst, et al., 2024). Implikasi dari kejadian tersebut, Jawa termasuk *Oosthook* Jawa yang merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Kumpeni diwariskan kepada Pemerintah Kolonial Belanda (Margana, 2007).

3. *Enrichment* Materi Sejarah Kumpeni di Banger Abad XVIII

Secara etimologi, *Enrichment* berasal dari kata *enrich* yang berarti memperkaya. Mengacu pada arti tersebut, *Enrichment* dapat diartikan sebagai upaya memperkaya atau menambah sesuatu menjadi lebih. Dalam konteks pembelajaran, *Enrichment* berguna untuk memaparkan sebuah program yang berkaitan dengan pengayaan (Tricahyono, 2021). *Enrichment* dalam arti luas berkaitan dengan praktik-praktik pendidikan standar, sementara secara lebih spesifik *Enrichment* hanya menyajikan

sesuatu semenarik mungkin sehingga dapat meningkatkan minat peserta didik untuk terus belajar (Surya, 2015). Secara konseptual, *Enrichment* menawarkan kegiatan yang lebih variatif. Materi *Enrichment* lebih mendalam dan mendetail jika dibandingkan dengan materi reguler (Nawawi & Swandari, 2021). *Enrichment* menyajikan topik baru atau memperdalam materi sesuai dengan capaian pembelajaran yang berlaku. Pada dasarnya, *Enrichment* dapat diimplementasikan kepada peserta didik yang telah mendapatkan nilai formatif tepat atau di atas ketuntasan minimal.

Sudah sepatutnya *Enrichment* mendapat perhatian khusus dalam program pendidikan. Mengingat kegiatan pembelajaran di dalam kelas merepresentasikan kemampuan peserta didik yang beragam. Peserta didik dengan level kemampuan menengah dan bawah seringkali mendapat kesempatan untuk menguasai sebuah materi pembelajaran melalui kegiatan remedial teaching (Yulianti et al., 2022). Namun demikian, peserta didik dengan kemampuan melebihi standar seyogyanya tidak mendapat perlakuan sama sehingga butuh perlakuan khusus. Pada kegiatan pembelajaran normal, peserta didik dengan kemampuan melebihi standar dinilai memiliki kemampuan sesuai tujuan pembelajaran atau lebih sehingga tidak perlu mendapatkan materi tambahan. Kondisi semacam itu membuat peserta didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata dibiarkan memperoleh pengetahuan sampai pada batas yang telah ditetapkan. Padahal kemampuan peserta didik dengan kemampuan melebihi standar perlu ditingkatkan melalui kegiatan *Enrichment*. Oleh karena itu, program *Enrichment* merupakan program khusus yang bisa saja keluar dari konteks kurikulum yang berlaku maupun kegiatan pembelajaran konvensional.

Kurikulum Merdeka saat ini menjadi kurikulum resmi yang berlaku di Indonesia. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang memiliki struktur pembelajaran intrakurikuler yang cukup variatif. Desain pembelajaran intrakurikuler yang variatif bertujuan agar peserta didik dapat mendalami konsep dan menguatkan kompetensi secara optimal (Rani et al., 2023). Selain itu, kurikulum Merdeka memuat istilah pembelajaran paradigma baru. Paradigma baru bukan berarti menghadirkan konsep dan prinsip pembelajaran yang benar-benar baru, melainkan memastikan praktik kegiatan belajar mengajar sebagian besar berpihak pada peserta didik (Barlian & Solekah, 2022). Dengan kata lain, kurikulum Merdeka menuntut guru mampu mengembangkan perangkat pembelajaran yang inovatif sehingga berdampak positif bagi perkembangan peserta didik. Tidak hanya itu, penekanan dalam kurikulum Merdeka terletak pada terbentuknya kemerdekaan dalam berpikir dalam diri peserta didik (Ainia, 2020).

Dasar yang digunakan adalah capaian pembelajaran sejarah Fase F sesuai dengan (Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 032/H/KR/2024 Tentang Capaian Pembelajaran Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah Pada Kurikulum Merdeka, 2024). Bunyi capaian mata pelajaran sejarah pada Fase F sebagai berikut.

“Pada Fase F, peserta didik mempelajari berbagai peristiwa sejarah yang terjadi dalam kehidupan bangsa Indonesia sebagai materi lanjutan Fase E (mata pelajaran IPS). Penekanan substansi diarahkan pada perjalanan sejarah Indonesia mulai dari penjajahan bangsa Barat, perlawanan rakyat daerah terhadap penjajah, pergerakan kebangsaan Indonesia, pendudukan Jepang, proklamasi kemerdekaan Indonesia, mempertahankan kemerdekaan Indonesia, pemerintahan Sukarno, pemerintahan Suharto, dan reformasi”.

Mengingat *Enrichment* membutuhkan eksplorasi materi yang relatif baru, maka materi *Enrichment* Penjajahan Bangsa Barat dapat dikembangkan melalui pendekatan eksplorasi materi sejarah lokal. Tidak hanya sebagai pengembangan materi, sejarah lokal sekaligus dapat menjadi alternatif stimulus dan materi guna melatih dan mengoptimalkan keterampilan berpikir sejarah peserta didik (Hidayanti & Hidayat, 2020). Hal tersebut selaras dengan tantangan positif pembelajaran sejarah era kurikulum Merdeka bagi peserta didik untuk dapat menanamkan keterampilan berpikir sejarah. Berpikir sejarah merupakan konsep berpikir yang membuat peserta didik atau manusia dapat belajar dari pengalaman terdahulu (Zed, 2018). Dengan berpikir sejarah, peserta didik mampu membangun narasi sejarah sesuai dengan catatan-catatan dan bukti-bukti dari perbandingan fakta yang ditemukan secara luas dan melalui penafsiran yang telah dilakukan. Berpikir historis atau berpikir sejarah menuntut peserta didik berfikir dengan cara yang tidak biasa – bahkan bertentangan dengan cara berpikir dalam keseharian – yakni mampu berpikir analitis dan kritis sehingga dapat memahami materi sejarah secara utuh, menganalisis peristiwa sesuai dengan konteks, berdiskusi, dan melakukan evaluasi (Firmansyah et al., 2022).

Salah satu sarana pembelajaran yang potensial menyampaikan pengembangan materi kepada peserta didik adalah dengan suplemen materi. Suplemen materi merupakan sarana pendukung yang digunakan guru guna melengkapi perangkat pembelajaran yang telah ada untuk memperkaya pengetahuan peserta didik (Indriastuty & Jumardi, 2021). Bentuk suplemen pembelajaran dapat berupa buku, materi, infografis, video, animasi, simulasi, dan lain-lain. Berdasarkan uraian sebelumnya, sejarah Kumpeni di Banger Abad XVIII dapat menjadi suplemen materi Penjajahan Bangsa Barat sesuai dengan capaian pembelajaran sejarah pada fase F era Kurikulum Merdeka.

Penyusunan suplemen materi sejarah bertujuan untuk memberikan perspektif yang lebih mendalam dan kontekstual terhadap peristiwa kolonialisme di Banger sebagai wilayah bekas jajahan Kumpeni. Dengan demikian, peserta didik dapat memiliki pengetahuan yang kaya tentang bagaimana sejarah kolonialisme dan perlawanan bangsa Indonesia dalam lingkup yang lebih fokus dan kontekstual (Sulistyo, 2019). Dengan mengintegrasikan suplemen materi sejarah berbasis sejarah lokal dalam pembelajaran mengenai kolonialisme dan perlawanan bangsa Indonesia di Banger, peserta didik akan mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dan terhubung secara emosional terhadap sejarah bangsanya. Pendekatan semacam ini tidak hanya memberikan wawasan sejarah yang lebih kaya, tetapi juga merangsang rasa kebanggaan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang perjuangan para pendahulu dalam menghadapi Kumpeni.

Suplemen materi yang telah disusun dapat diimplementasikan dalam pembelajaran melalui pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme relevan dengan tuntutan Kurikulum Merdeka yaitu kegiatan pembelajaran harus berpihak sepenuhnya pada kepentingan peserta didik (Yokoyama et al., 2023). Konstruktivisme dalam konteks pendidikan memiliki perspektif bahwa peserta didik secara otonom sedapat mungkin membangun kerangka ilmu pengetahuan dan kecerdasan melalui interaksi dengan dunia fisik dan sosial (Schunk, 2012). Oleh karena itu, pendekatan konstruktivistik dalam pembelajaran sejarah dapat disusun secara tematik dengan memuat permasalahan utama, konsep dasar, serta ide konseptual secara holistik. Selain itu, pendekatan konstruktivisme memiliki keunggulan membuat kegiatan belajar menjadi lebih bermakna (*meaningfull*). Kaitan pembelajaran bermakna dengan pendekatan konstruktivisme terjadi melalui praktik peserta didik mampu

mengkonstruksi pengetahuan secara otonom atau menciptakan makna sebagai hasil proses berpikir dan interaksi dengan konteks sosial.

Perlu diketahui bahwa konstruktivisme secara konseptual merupakan teori yang khusus membahas tentang penciptaan makna. Berdasar penjelasan Piagetian Psychological Constructivism, setiap individu dapat menciptakan makna dan definisi baru berdasarkan interaksi antara sesuatu yang telah dimiliki, dipahami, dan dipercayai dengan informasi baru yang sesuai dengan konsep pada masing-masing kognitif peserta didik. Struktur kognitif berisi fakta, konsep, dan generalisasi-generalisasi yang sebelumnya telah dipelajari oleh peserta didik (Yulien & Harahap, 2022).

Pembelajaran bermakna bisa didapat melalui kegiatan belajar dengan mengelaborasi fenomena baru dalam struktur pengetahuan kognitif peserta didik (Malik & Sujarwo, 2023). Secara konkret, terdapat alternatif pendekatan konstruktivisme melalui model siklus belajar melalui tiga langkah utama, yaitu *discovery*, pengenalan konsep, dan aplikasi konsep (Supardan, 2016). Langkah pertama adalah *discovery* yang terfokus pada peran aktif peserta didik untuk menciptakan pertanyaan terbuka maupun hipotesis mengenai suatu pengetahuan baru. Setelah *discovery*, tahap dilanjutkan dengan pengenalan konsep melalui guru mempertanyakan konsep-konsep pengetahuan awal yang telah dimiliki peserta didik berhubungan dengan topik materi *Enrichment*. Kemudian pada tahap terakhir terdapat aplikasi konsep melalui penerapan konsep yang dikemukakan tahap sebelumnya serta dapat mengulangi tahapannya lagi (Supardan, 2016).

Secara kontekstual, penerapan model siklus belajar berkaitan dengan pembelajaran sejarah khususnya materi Kumpeni di Banger abad XVIII dapat diimplementasikan melalui beberapa tahap. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, tahap pertama adalah *discovery* melalui tahap peserta didik bertanya atau membuat hipotesis mengenai sejarah Kumpeni di Banger abad XVIII melalui analisis bukti-bukti peninggalan maupun sumber sejarah Kumpeni di Banger yang masih dapat diakses hingga saat ini. Kemudian pada tahap pengenalan konsep peserta didik dapat merekonstruksi proses terjadinya kolonialisme di Kepulauan Indonesia yang kemudian berlanjut fokus pada bahasan Kumpeni di Banger. Selanjutnya pada tahap aplikasi konsep para peserta didik mampu mengaitkan pengaruh kolonialisme Kumpeni di Banger terhadap kehidupan politik, ekonomi, dan sosial masyarakat melalui diskusi kelompok. Peserta didik juga dituntut mampu memaknai muatan nilai-nilai historis dalam sejarah Kumpeni di Banger berdasarkan konsep berpikir sejarah yang telah dipelajari sebelumnya. Nilai-nilai historis yang telah dipelajari dapat menjadi acuan dalam internalisasi pengembangan karakter kebangsaan peserta didik dalam menyikapi tantangan perubahan zaman yang semakin kompleks (Fitriani & Fatmariza, 2022).

CONCLUSION

Kurikulum Merdeka membuka peluang sekaligus tantangan bagi guru sejarah untuk melakukan eksplorasi berbagai materi sejarah berbasis sejarah lokal yang sesuai dengan capaian pembelajaran. Eksplorasi pembelajaran sejarah dapat dilakukan melalui pendekatan materi sejarah berbasis sejarah lokal. Sejarah Kumpeni di Banger Abad XVIII dapat menjadi suatu alternatif materi pembelajaran sejarah berbasis sejarah lokal. Kekuasaan Kumpeni di Banger Abad XVII tidak lepas dari peristiwa Geger Pecinan 1740-1743 serta perjanjian dengan Sunan Pakubuwana II yang berimplikasi pada penyerahan wilayah kekuasaan *Oosthoek* Jawa kepada Kumpeni. Saat berkuasa di Banger, Kumpeni

menerapkan kebijakan pada bidang politik, ekonomi, dan sosial yang relatif membebani rakyat dan berpihak pada kepentingan Kumpeni.

Sesuai dengan struktur kurikulum Merdeka, materi sejarah lokal Kumpeni di Banger Abad XVIII dapat menjadi *Enrichment* atau pengayaan materi sejarah khususnya pada pembahasan materi Penjajahan Bangsa Barat. Selain untuk mengakomodasi peserta didik dengan kompetensi tepat atau di atas standar, *Enrichment* materi Kumpeni di Banger Abad XVIII dapat digunakan sebagai stimulus dalam meningkatkan kompetensi berpikir sejarah. Kompetensi berpikir sejarah dapat dilatih dengan pendekatan konstruktivisme menggunakan model siklus belajar yang terdiri atas tahap *discovery*, pengenalan konsep, dan aplikasi konsep.

REFERENCES

- Ainia, D. K. (2020). Merdeka belajar dalam pandangan Ki Hadjar Dewantara dan relevansinya bagi pengembangan pendidikan karakter. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 3(3), 95-101.
- Arifin, W. (1995). *Babad Blambangan*. Ecole Française d'Extrême-Orient & Yayasan Bentang Budaya.
- Astutik, R. M., & Alrianingrum, S. (2013). Gemeente Probolinggo 1918-1926. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 1(3).
- Aziz, A. (2020). *Persekutuan Muslim Jawa Dan Etnis Tionghoa Melawan Belanda Dalam Perang Sabil Di Lasem (1750 M)* (Doctoral Dissertation, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- Aziz, A. & Wildan, M. (2022). Persekutuan Musim Jawa-Tionghoa Melawan Belanda Dalam Perang Sabil Lasem (1750 M). *Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal*.
- Barlian, U. C., & Solekah, S. (2022). Implementasi kurikulum merdeka dalam meningkatkan mutu pendidikan. *JOEL: Journal of Educational and Language Research*, 1(12), 2105-2118.
- Basri, M., Ayu, S. N., Nabilla, G., & Berutu, S. L. (2024). Background to the Arrival of the Dutch, VOC, Dutch East Indies. *EDUCTUM: Journal Research*, 3(1), 21-26.
- Buddingh, S. A. (1859). *Neêrlands Oost Indië* (Vol. 1). M. Wijt en zonen.
- Daradjadi, D. (2017). *Geger Pecinan 1740-1743: Persekutuan Tionghoa-Jawa Melawan VOC*. PT. Kompas Media Nusantara.
- Firmansyah, H., Putri, A. E., & Hakim, L. (2022). Penguatan literasi sejarah untuk meningkatkan historical thinking peserta didik. *Jurnal Artefak*, 9(2), 93-102.
- Fitriani, Y., & Fatmariza, F. (2022). Manfaat kesadaran sejarah dalam membangun karakter bangsa. *Jurnal Penelitian Guru Indonesia*, 7(2), 278-283.
- Hartatik, E. S. (2018). the Highway and Economy Development a Historical Study of the Development of Economical Knots At the North Coastal of Java (Pantura) in 1930S-1980S. *Paramita-Historical Studies Journal*, 28(1), 80-91.
- Hasibuan, E. D., Basri, M., & Siregar, D. (2024). Situasi Dan Kondisi Perlawanan Terhadap Penjajahan Belanda Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), 325-329.
- Hidayanti, T., & Hidayat, B. (2022). Pengembangan Ensiklopedia Digital Bangunan Bersejarah Di Kota Metro Sebagai Sumber Belajar Sejarah Lokal Kelas X Sma Negeri 2 Metro. *SwarnaDwipa*, 4(2), 83-91.
- Husin, H. (2016). Ujung Senja Pabrik-Pabrik Gula di Batavia Awal Abad ke-18. *Sosio e-Kons*, 8(2).

- Indriastuty, H. R., & Jumardi, J. (2021). Daan Mogot Dalam Pertempuran Lengkong Sebagai Suplemen Materi Perjuangan Revolusi Mempertahankan Kemerdekaan. *Candrasangkala: Jurnal Pendidikan dan Sejarah*, 7(1), 1-9.
- Jonge, J. K. J. de. (1862). *De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indië: 1595-1610* (Vol. 1). Nijhoff.
- Kartodirdjo, S. (1988). *Pengantar sejarah Indonesia baru: 1500-1900*. Gramedia.
- Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 032/H/KR/2024 Tentang Capaian Pembelajaran Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah Pada Kurikulum Merdeka, Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi 1 (2024).
https://kurikulum.kemdikbud.go.id/file/1718471412_manage_file.pdf
- Kuntowijoyo, D. R. (2005). *Pengantar ilmu sejarah*. Benteng Pustaka.
- Kurniati, P., Kelmaskouw, A. L., Deing, A., Bonin, B., & Haryanto, B. A. (2022). Model proses inovasi kurikulum merdeka implikasinya bagi siswa dan guru abad 21. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(2), 408-423.
- Kuswono, K., Sumiyatun, S., & Setiawati, E. (2021). Pemanfaatan Kajian Sejarah Lokal Dalam Pembelajaran Sejarah di Indonesia. *Jurnal Lentera Pendidikan Pusat Penelitian Lppm Um Metro*, 6(2), 206-209.
- Lekkerkerker, J. G. W. (1931). *Probolinggo, Geschiedenis En Overlevering*. J. H. De Bussy.
- Mahdun, M. (2017). Pembakaran Rumah Cina Di Desa Trusmi Tahun 1948. *Tamaddun*, 5(2), 76-93.
- Malik, M. A. (2023). Kajian Literatur Penggunaan Model Pembelajaran Kontekstual Pada Pelajaran IPS SMP. *Dirasah: Jurnal Studi Ilmu dan Manajemen Pendidikan Islam*, 6(2), 387-393.
- Margana, S. (2007). *Java's Last Frontier: The Struggle for Hegemony of Blambangan C. 1763-1813* (Doctoral dissertation, Universiteit Leiden).
- Nawawi, I., & Swandari, T. (2021). Pengembangan Potensi Siswa Cerdas Intelektual Berbakat Islami Melalui Program Akselerasi. *Aulada: Jurnal Pendidikan Dan Perkembangan Anak*, 3(2), 152-182.
- Nst, H. M., Lubis, L. S., Siagian, I. D., & Sahlan, S. (2024). Kasus Kasus di Indonesia White Color Crime (WCC). *Bersatu: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika*, 2(1), 56-61.
- Nugroho, A. S. (2023). Perubahan Ekonomi Dan Politik Surabaya Di Bawah Hegemoni Voc Pada Abad Ke-18. *Handep: Jurnal Sejarah dan Budaya*, 6(2), 131-154.
- Ofianto, O. (2017). Model Learning Continuum Keterampilan Berpikir Historis (Historical Thingking) Pembelajaran Sejarah SMA. *Diakronika*, 17(2), 168-204.
- Pramartha, I. N. B., & Parwati, N. P. Y. (2020). Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Sejarah. *Widyadari*, 21(2), 688-694.
- Pramasto, A., & Meyrynaldy, B. (2020). Pengaruh Penetrasi Barat dalam Peredaran Komoditas Candu di Indonesia Abad Ke-17 Hingga Ke-20. *Jurnal Artefak*, 7(2), 117-128.
- Prasetya, A., Waro, W., & Sudiyanto, S. (2022). Sejarah Lokal Dalam Kurikulum Merdeka: Situs Loyang Mendale Dan Loyang Ujung Karang Sebagai Muatan Sejarah Lokal Dalam Pembelajaran Sejarah. *Jurnal Pendidikan Sejarah Indonesia*, 5(2).

- Rahayu, D. P., & Wirajaya, A. Y. (2020). Hikayat Susunan Kuning dalam Negeri Gagelang: Sebuah Tinjauan Historiografi. *Jumantara: Jurnal Manuskrip Nusantara*, 11(1), 1-18.
- Rani, P. R. P. N., Asbari, M., Ananta, V. D., & Alim, I. (2023). Kurikulum merdeka: transformasi pembelajaran yang relevan, sederhana, dan fleksibel. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 2(6), 78-84.
- Remmeling, W. (2022). *Perang Cina Dan Runtuhnya Negara Jawa 1725-1743*. Jendela.
- Rimatuzzahriah, E., & Abrar, N. I. (2023). Implementasi Aplikasi Moodle Dalam Pembelajaran Sejarah Pada Kurikulum Merdeka. *Sosial Dan Humaniora*.
- Salsabilla, D., & Ramadinata, M. L. (2021). Potensi Wisata Sejarah Peristiwa Geger Pecinan Di Kartasura Melalui Situs Keraton Kartasura Di Era Revolusi Industri 4.0. *Prosiding Pekan Sejarah*.
- Santika, I. G. N., Suarni, N. K., & Lasmawan, I. W. (2022). Analisis perubahan kurikulum ditinjau dari kurikulum sebagai suatu ide. *Jurnal Education and development*, 10(3), 694-700.
- Sapto, A. (2014). Kota Probolinggo pada masa menjelang dan awal revolusi. *LITERASI: Indonesian Journal of Humanities*, 2(1), 36-48.
- Schunk, D. H. (2012). *Learning theories an educational perspective*. Pearson Education, Inc.
- Shabri, S., Kusdiwanggo, S., & Yusran, Y. A. (2023). Dari Realita Menjadi Wacana: Representasi Panoptisisme Pada Perencanaan Kota Probolinggo. *Langkau Betang: Jurnal Arsitektur*, 10(1), 29-44.
- Sulistiyono, S. T. (2017). Peranan Pantai Utara Jawa Dalam Jaringan Perdagangan Rempah. In *Makalah disampaikan pada Seminar Nasional mengenai Jalur Rempah dengan tema "Rempah Mengubah Dunia" (Makassar: 11-13 Agustus 2017)*.
- Sulistyo, W. D. (2019). Study on Historical Sites: Pemanfaatan Situs Sejarah Masa Kolonial di Kota Batu sebagai sumber pembelajaran berbasis outdoor Learning. *Indonesian Journal of Social Science Education (IJSSE)*, 1(2), 124-135.
- Supardan, H. D. (2016). Teori dan praktik pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran. *Edunomic Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 4(1).
- Surya, R. A. (2015). Penerapan Remedial dan *Enrichment* Model Renzulli untuk Meningkatkan Keaktifan dan Hasil Belajar Sejarah Peserta Didik SMK Negeri 1 Jember Semester Genap Tahun Ajaran 2014/2015.
- Tifada, D. A., & Noviana, R. (2020). *Asal-Usul Lahirnya Kata "Kompeni"*.
- Tricahyono, D. (2021). Tradisi Meganan dan Muatan Pendidikan Nilai sebagai *Enrichment* dalam Pembelajaran Sejarah di Kabupaten Trenggalek. *Indonesian Journal of Social Science Education (IJSSE)*, 3(1), 1-9.
- Utami, C. S. M., Wijayati, P. A., Milla, N. U. P., & Rohman, M. (2023). Ekonomi Perdagangan Dan Penyebaran Islam: Menelisik Kejayaan Demak Dalam Jaringan Kemaritiman. *Bookchapter Ekonomi Universitas Negeri Semarang*, (2), 72-100.
- Warren, J. F. (1998). *The Sulu Zone: The world capitalist economy and the historical imagination*. VU University Press.
- Wasino, W., & Hartatik, E. S. (2019). Rice Policy in Java from Traditional Kingdoms to Dutch Colonial Time. *KnE Social Sciences*, 730-735.
- Wertheim, W. F. (1959). *Indonesian society in transition: A study of social change*. Sumur Bandung.
- Widja, I. G. (1991). *Sejarah lokal suatu perspektif dalam pengajaran sejarah*. Penerbit Angkasa.
- Wijayati, P. A. (2010). Model Pungutan Pajak Pada Masa Kumpeni Di Jawa Timur. *Paramita: Historical Studies Journal*, 20(2).

- Winarni, R. (2018). Maduranisation Native Government Bureaucracy Elite in Besuki Residency, 1818-1942. *PARAMITA: Historical Studies Journal*, 28(2), 152-163.
- Yokoyama, Y., Nadeak, B., & Sihotang, H. (2023). Implementasi Kompetensi Guru Penggerak Dalam Menerapkan Merdeka Belajar SMK Di Tana Toraja. *Jurnal Dinamika Pendidikan*, 16(2), 187-200.
- Yulianti, I., Kurniawati, Y., & Winarko, A. *Enrichment Materi Pembelajaran Sejarah tentang Peranan Peranakan Arab Pada Masa Pergerakan Kemerdekaan Indonesia. Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, 5(1), 1-8.
- Yulien, B. Z., & Harahap, A. (2022). Analisis Kebijakan Kemendikbud Dalam Pendidikan Masa Covid-19 Penulis. *Annaba': Jurnal Pemikiran Pendidikan Islam, Pembelajaran Dan Pengajaran*, 1(1), 1-11.
- Zed, M. (2018). Tentang konsep berfikir sejarah. *Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Budaya*, 13(1).